

BAB IV

KODISI EMPIRIK DARI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : www.wikipedia.com

Gambar 4.1

Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta dibagian selatan dibagian selatan dibatasi lautan

Indonesia, sedangkan dibagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- a. Kabupaten Klaten sebelah Timur Laut.
- b. Kabupaten Wonogiri sebelah Tenggara.
- c. Kabupaten Purworejo sebelah Barat.
- d. Kabupaten Magelang sebelah Barat Laut.

Berdasarkan satuan fisiografis Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari

- a. Pegunungan Selatan dengan laut $\pm 1.656.25 \text{ km}^2$ dengan ketinggian 150-700m
- b. Gunung Merapi dengan luas $\pm 582.81 \text{ km}^2$ dengan ketinggian : 80-2.911 m
- c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo dengan luas $\pm 1.215.62 \text{ km}^2$ dengan ketinggian : 0-80 m
- d. Pegunungan Kulonprogo dan Dataran rendah selatan dengan luas : $\pm 706.25 \text{ km}^2$ dengan ketinggian : 0-572 m

Posisi D.I. Yogyakarta yang terletak antara $7^{\circ}.33'$ - $8^{\circ}.12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00'$ - $110^{\circ}.50'$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas $3.185,80 \text{ km}^2$ atau 0,17 % dari luas Indonesia ($1.860.359,67 \text{ km}^2$).

Merupakan provinsi terkecil setelah provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari

- a. Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586.72 km^2 (18,40%).
- b. Kabupaten Bantul, dengan luas $506,85 \text{ km}^2$ (15,91%).
- c. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas $1.485,36 \text{ km}^2$ (46,63%)

- d. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%)
- e. Kota Yogyakarta, dengan luas 32.50 km² (1,02%)

Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional dari 3.185,80 km² luas D.I. Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 % Regosol, 12,38% Lathosol, 10,97 %, Grumusol, 10,84% Mediterm, 3,19% Alluvial dan 2,47 % adalah tanah jenis Rensina.

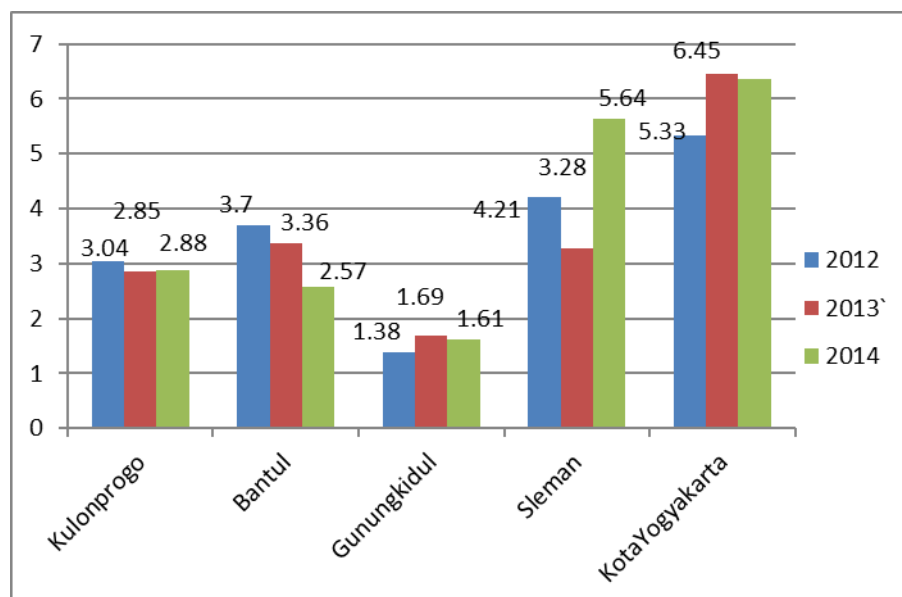
3. Kondisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara Administratif

Secara administratif, DIY menjadi wilayah otonom yang memiliki keistimewaan khusus dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang kedudukan hukum DIY. Berdasarkan sejarah dan hak asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa . kewenang dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Wilayah administrasi DIY terbagi menjadi % kabupaten/kota tersebut meliputi kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Pusat penyelenggaraan Pemerintah pada tingkat provinsi berada di Kota Yogyakarta (BPS DIY, 2017).

B. Kondisi Empirik

1. Kondisi Pengangguran Terbuka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengangguran adalah kondisi taraf hidup manusia ketika belum memiliki pekerjaan karena tidak mampu bersaing dalam lapangan kerja ataupun tidak mau memanfaatkan lapangan kerja yang tersedia. Keadaan Tingkat Pengangguran yang menunjukkan adanya perubahan di empat Kabupaten dan satu Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2 tahun terakhir .



Gambar 4.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kta di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2014

Berdasarkan diagram diatas Tingkat Pengangguran Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2014 masing-masing kabupaten/kota mengalami fluktuatif, hanya satu Kabupaten yaitu Kabupaten Bantul yang mengalami penurunan dengan hasil data tahun 2012-2014 yaitu 3,7 persen, 3,36 persen dan 2,57 persen.

2. Kondisi Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2035 jumlah penduduk DIY tahun 2016 tercatat 3.720.912 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,45 persen dan penduduk perempuan 50,55 persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 terhadap tahun 2010 mencapai 1,18 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yang mencapai 1.13 persen (BPS DIY, 2017)

Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di DIY tercatat 1.168 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.854 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayahterluas mencapai 46,63% persen memiliki kepadatan penduduk terendah yang diburu rata-rata 486 jiwa per km² (BPS DIY, 2017).

Tabel 4.1
Kondisi Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
Tahun 2010-2017

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Guungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2010	389.661	909.539	677.376	1.103.534	387.379
2011	394.200	922.104	685.003	1.116.184	392.506
2012	398.672	934.674	692.579	1.128.943	397.594
2013	403.179	947.072	700.191	1.141.733	402.679
2014	407.709	959.445	707.794	1.154.501	407.667
2015	412.198	971.511	715.282	1.167.481	412.704
2016	416.683	983.527	722.479	1.180.479	416.683
2017	421.295	995.264	729.364	1.193.512	422.732

Sumber :BPS DIY

Dilihat dari Tabel 4.3 diatas, jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi DIY mengalami Peningkatan setiap tahunnya, peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kualitas penduduk tersebut. Jumlah terbanyak di Provinsi DIY berada pada Kabupaten Sleman yaitu dengan jumlah 1.193.512 jiwa pada tahun 2017.

Menurut angka Proyeksi Penduduk 2010-2035, komposisi penduduk D.I. Yogyakarta menurut kelompok umur didominan oleh kelompok dewasa yaitu umur 25-29 tahun sebesar 8,46 persen. Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 28,88 persen. Kelompok umur 25-29 tahun 49,32 persen dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun keatas sebesar 13,58 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk D.I. Yogyakarta yang mencapai 74,71 (BPS DIY, 2017).

3. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah setiap tahun yang didapatkan dari potensi disetiap wilayah/daerah diantaranya pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta penerimaan lainnya yang telah sah dan terdapat peraturan daerah. Berikut perkembangan daerah yang berasal dari empat kabupaten dan satu kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.2
Kondisi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Provinsi				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2010	48589685	81637099	42542031	163056459	179423640
2011	53752294	128896456	54462419	226686250	228870562
2012	74028664	166597778	67050782	301069539	338839606
2013	64750332	170006171	66710859	298406947	304797499
2014	158623927	357411064	159304338	576337600	470634762
2015	170822327	390624492	196099244	643130080	510548823
2016	180273364	404454704	20627865	717151176	540504305
2017	221215013	369224767	192374662	698754168	511132838

Sumber: BPS DIY

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan Kondisi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah memperlihatkan pertumbuhan yang tidak signifikan setiap tahunnya di tiap daerah kecuali kabupaten kulonprogo. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari penerimaan daerah untuk pembangunan daerah semaksimal dan sebaik mungkin.

4. Kondisi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Upah Minimum yaitu standar minimum yang digunakan oleh para usaha/perusahaan untuk memberikan upah kepada pekerja yang bersifat rutin setiap minggu atau bulan walaupun tidak masuk kerja tetapi gaji atau upah akan tetap masuk.

Tabel 4.3
Kondisi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2010-2017

Tahun	Provinsi				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2010	751000	756000	746000	761000	766000
2011	815000	822000	808000	829000	836000
2012	897000	902000	893000	906000	911000
2013	954339	993484	947114	1026181	1065247
2014	1069000	1125500	988500	1127000	1173300
2015	1138000	1163800	1108249	1200000	1302500
2016	1268870	1297700	1235700	1338000	1452400
2017	1373600	1404760	1337650	1448385	1572200

Sumber: BPS DIY

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan Upah Minimum tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar Rp. 1.572.200 pada tahun 2017 dan peningkatan Upah Minimum ini berdampak positif untuk masyarakat agar lebih termotivasi dan semakin giat untuk bekerja. Meningkatkan tingkat konsumsi domestik dengan upah minimum yang tinggi maka masyarakat dapat mengkonsumsi lebih banyak barang domestik yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indek yang daoat mengukur perkembangan pembangunan manusia yang didasari oleh aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan secara ekonomi. Pencapaian kondisi indeks pembangunan manusia menggambarkan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang membaik. Perkebangan secara keseluruhan di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Berikut adalah tabel perkembangan yang terdapat di empat kabupaten dan satu kota yang mencakup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.4
Kondisi IPM pada empat Kabupaten dan satu Kota dengan IPM tertinggi kedua di Indonesia

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kulonprogo	68,83	69,53	69,74	70,14	70,68	71,52	72,38	73,23
Bantul	75,31	75,79	76,13	76,78	77,11	77,99	78,42	78,67
Gunungkidul	64,2	64,83	65,69	66,31	67,03	67,41	67,82	68,73
Sleman	79,69	80,04	80,1	80,26	80,73	81,2	82,15	82,85
Kota Yogyakarta	82,72	82,98	83,29	83,61	83,78	84,56	85,32	85,49

Sumber: BPS DIY

Dari tabel 4.3 yang menunjukkan kondisi angka indeks pembangunan manusia di empat kabupaten dan satu kota diatas dapat disimpulkan bahwa kelima provinsi tersebut berada pada tingkat pembangunan manusia menengah dari tahun 2010 sampai 2017 dalam data tersebut mengalami peningkatan tiap ahunnya. IPM tertinggi dari empat kabupaten dan satu kota tersebut terjadi pada Kota Yogyakarta yang mengalami peningkatan dari tahun 2010 dengan angka 82,72 mengalami peningkatan cukup positif menjadi 85,49 pada tahun 2017. Dan diikuti oleh Kabupaten Kulon progo, Bantul, Gunungkidul dan Sleman